

EMPOWERMENT OF RESERVE COMPONENTS IN STATE DEFENSE EFFORTS IN
THE AREA OF KODAM III/SILIWANGI TO SUPPORT THE LAND DEFENSE
STRATEGY

Oleh

Tjahjono¹, Kamistan Hadirin², Lukman Yudho Prakoso³, Sunarko⁴, Mitro Prihantoro⁵,
Heri Abriyadi⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Email: ³lukman.prakoso@idu.ac.id

Abstract

Indonesia adheres to the Universal Defense System in dealing with military and non-military threats, which involve citizens, territories and other national resources. Article 7 paragraph 1 of Law number 3 of 2002 concerning National Defence, states that National Defense is organized by the government and is prepared early on with the national defense system. In this system, the main component is the TNI, supported by reserve components and supporting components. The National Resources prepared to strengthen the strength and capability of the main components of national defense are Reserve Components, in this case human resources. This formation is voluntary, given basic military training, determination and development of both administration and capabilities and deployment through mobilization and only based on orders from the President through the approval of the DPR. A strategy is needed so that the potential of the Reserve Component can be maximized in the effort to defend the country in the Kodam III/Siliwangi area as part of the land defense strategy. The research objective is to analyze the empowerment of Reserve Components in an effort to defend the country to support land defense strategies. This study uses a qualitative research method with a phenomenological approach. The data obtained from the informants who have been determined are then analyzed using qualitative analysis techniques. The results of the study show that the development of Reserve Components and the empowerment of Reserve Components have not been fully implemented because they are hampered by regulations in the use of Reserve Components and their budgeting. From the data above it can be concluded that Kodam III/Siliwangi carried out the formation of the Reserve Component in accordance with the applicable law, empowerment, in this case involvement in activities related to defending the country has not been carried out, but several Reserve Component personnel have been included in the training organized by Kodam III/ Siliwangi. Advice that can be given from the conclusions above is that it is necessary to revise regulations regarding the use of Reserve Components to be involved in activities related to defending the state in order to maintain the ability to defend the state.

Keywords: Strategy, Empowerment, State Defense, and Ground Defense

PENDAHULUAN

Undang-undang nomor 23 tahun 2019 pasal 6 ayat 3 menyebutkan bahwa hak warga negara dalam usaha bela negara selain mendaftar sebagai calon anggota TNI yaitu, mendapatkan Pembinaan dasar kewarganegaraan yang dilaksanakan melalui pembinaan kesadaran bela negara dan

mendaftar sebagai calon anggota komponen cadangan. Sedangkan pada ayat 4 disebutkan bahwa kewajiban warga negara dalam usaha bela negara diantaranya diberlakukan sebagai anggota komponen cadangan. Pasal 29 Undang-undang nomor 23 tahun 2019 menyebutkan Komponen cadangan disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna

memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama dalam menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida. Selanjutnya dalam hal pengelolaan komponen cadangan yaitu mulai dari pembentukan dan penetapan, pembinaan serta penggunaan dan pengembalian diatur oleh perundangan yang berlaku serta mengacu pada kebijakan umum Pertahanan Negara dengan menerapkan sistem tata kelola Pertahanan Negara yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia dan menaati peraturan perundangan (Lukman Yudho Prakoso, Odi Marefanda, 2017).

Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara pada pasal 2 poin a menyebutkan implementasi pertahanan darat, laut dan udara dengan merealisasikan pembangunan komponen cadangan dan komponen pendukung. Selanjutnya pada poin b menyebutkan pengembangan dan implementasi konsep pertahanan pulau-pulau besar. Hal tersebut sangat berkaitan dengan keberhasilan pelaksanaan pertahanan negara terutama matra darat.

Tugas pokok TNI AD seperti disebutkan dalam doktrin TNI AD (Kartika Eka Paksi, 2020) adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara di darat. Pada salah satu tugas-tugasnya, TNI AD melaksanakan tugas TNI dalam pemberdayaan wilayah pertahanan di darat dengan membantu pemerintah menyiapkan potensi nasional yang meliputi wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya sesuai sistem pertahanan semesta. Dihadapkan dengan strategi dan taktik pertempuran darat masa depan dalam menghadapi ancaman militer maupun

nonmiliter, TNI AD mempersiapkan diri untuk melakukan tahapan perang berlarut (*protracted warfare*) yang sesuai dengan kebijakan pertahanan negara yaitu Sishankamrata yang mengacu pada pertahanan defensif aktif, menerapkan totalitas pengerahan seluruh sumber daya dan komponen bangsa untuk terlibat secara nyata dalam pertahanan dan keamanan negara yang bercirikan kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan (Jaya, Agus Damar, et al 2022).

Pelaksana lapangan dalam pengelolaan Komponen Cadangan diberikan ke Kotama jajaran TNI dengan kendali penuh dari Kementerian Pertahanan (Kurniawan, 2020). Salah satu Kotama tersebut yaitu Komando Daerah Militer (Kodam), sesuai Peraturan Kasad Nomor 69 Tahun 2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tugas Komando Daerah Militer. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Kodam melaksanakan fungsi utama yaitu pertempuran dan pembinaan teritorial serta fungsi organik yaitu Intelijen, Operasi, Personel, Logistik, Teritorial, Perencanaan serta Pengawasan dan Pemeriksaan (Lukman Yudho Prakoso, 2019). Kodam melalui fungsi utama pembinaan teritorial memiliki kewenangan dalam pengembangan, pengerahan dan pengendalian semua potensi wilayah pertahanan yang ada di wilayahnya termasuk Komponen Cadangan yang sudah terbentuk (Lukman Yudho Prakoso, 2018). Berdasarkan data dari staf Teritorial Kodam III/Siliwangi dan Ditjen Potan Kemhan RI, kader bela negara yang sudah terbentuk di wilayah Kodam III/Siliwangi sampai dengan tahun 2022 berjumlah 1.050 orang. Pembentukan dan penetapan Komponen Cadangan di wilayah Kodam III/Siliwangi pada tahun 2021 sebanyak 500 orang Matra Darat yang dilatih di Rindam III/Siliwangi. Selanjutnya pada tahun 2022 sebanyak 550 orang dimana 500 orang Matra Udara dilatih di Pusdiklat Kopasgat Bandung dan 50 orang Matra Darat dilatih di Pusdik Kowad Lembang.

Selaras dengan strategi dan taktik pertempuran darat masa depan dalam menghadapi ancaman militer maupun nonmiliter yang datang dari dalam maupun dari luar serta dalam rangka mengantisipasi ketidakpastian bentuk perang di masa depan, TNI AD mewujudkan Sishankamrata melalui pengembangan taktik gerilya yang mampu beradaptasi dengan perkembangan Iptek dalam bentuk kesiapan perang berlarut (Lukman Yudho Prakoso, 2021). Sehingga TNI AD dituntut untuk mengembangkan taktik pertempuran darat terintegrasi dengan seluruh kekuatan pertahanan negara aspek darat yang didukung oleh sumber daya nasional melalui pembentukan kantong-kantong gerilya yang dipersiapkan secara dini (Haris Amora, 2021). Hal ini tidak terkecuali dengan wilayah Kodam III/Siliwangi, sehingga perlu adanya pemberdayaan Komponen Cadangan tersebut yang nantinya akan memperkuat kemampuan Komponen Utama di wilayah Kodam III/Siliwangi.

Peneliti melihat fenomena yang terjadi terkait Komponen Cadangan yang sudah dibentuk dan proyeksi ancaman ke depan yang dapat menyerang semua dimensi yang berlaku di dalam masyarakat sangat memerlukan perhatian lebih dari pemerintah yaitu bahwa perlu adanya pemberdayaan Komponen Cadangan setelah dikembalikan, agar Komponen Cadangan tersebut selalu siap untuk dimobilisasi untuk mendukung komponen utama dalam melaksanakan tugasnya.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah kaidah-kaidah dalam mendalami dan menafsirkan arti dari anggapan sebagian orang atau kelompok individu terhadap makna yang bersumber dari permasalahan sosial atau masalah manusiawi (Creswell, 2019). Guna memperkuat hasil penelitian yang didapatkan secara kualitatif, nantinya akan digunakan pengujian keabsahan data yang akan diperjelas.

Fokus penelitian ini pada Pemberdayaan Komponen Cadangan di wilayah Kodam III/Siliwangi Guna Mendukung Strategi Pertahanan Darat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah diperoleh dari kegiatan observation (pengamatan), interview (wawancara), dan documentation (dokumentasi).

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah Kodam III/Siliwangi. Tempat penelitian di Kemhan RI, Makodam III/Siliwangi dan Rindam III/Siliwangi dipilih oleh peneliti karena Kemhan RI sebagai penentu kebijakan dalam pengelolaan Komponen Cadangan. Sedangkan Kodam III/Siliwangi sebagai Komando kewilayahan yang merekrut, membentuk melalui Pembinaan dan pelatihan dasar serta nantinya akan memobilisasi Komponen Cadangan. Kemudian Rindam III/Siliwangi sebagai satuan pelaksana lapangan yang memberikan Pembinaan dasar bela negara. Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan selama 5 bulan yaitu mulai bulan November 2022 sampai dengan Januari 2023.

Subjek dan Objek Penelitian

Subyek yang memiliki informasi dan dapat memberikan keterangan yang kredibel terkait topik penelitian dapat disebut sebagai subyek penelitian. Subyek penelitian ini adalah: (1) Dirjen Strahan; (2) Dirjen Pothan; (3) Panglima / Kepala Staf Kodam III/Siliwangi; (4) Asisten Teritorial Kodam III/Siliwangi; (5) Komandan Rindam Kodam III/Siliwangi; (6) Komandan Satdik Bela Negara Rindam III/Siliwangi; (7) Pabandya Binwanwil Sterdam Kodam III/Siliwangi; (8) Pasiopslat Satdik Bela Negara Rindam III/Siliwangi; (9) Rihan Hairul Zaman (PT. Pindad/Komcad); (10) Cecep Surahman (Swasta/Komcad). Obyek penelitian ini adalah Pemberdayaan Komponen Cadangan Dalam Upaya Bela Negara Guna Mendukung Strategi Pertahanan Darat, yang berfokus kepada Pemberdayaan Komponen Cadangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis data tentang Pembentukan Komponen Cadangan

Menurut Aster Kasdam III/Siliwangi mengatakan perekrutan dilaksanakan mulai saat kampanye/sosialisasi, pendaftaran, mobilisasi ke Rindam III/Siliwangi dan setelahnya dikembalikan ke daerah asal yang semuanya dilakukan oleh Kodam beserta jajarannya.

Menurut Danrindam III/Siliwangi, masyarakat wilayah Kodam III/Siliwangi sangat mendukung penuh pembentukan Komponen Cadangan, terbukti dari animo masyarakat yang mencapai ± 5.000 orang mendaftarkan diri secara sukarela.

Menurut Komandan dan Kauropsdik Dodik Bela Negara Rindam III/Siliwangi bahwa pelaksanaan pelatihan selama 3 (tiga) bulan dalam 600 JP, materi yang diberikan dalam pelatihan dasar kemiliteran dapat sepenuhnya diterima dengan baik. Disamping itu seluruh dukungan berupa perlengkapan perorangan lapangan dan prasarana latihan untuk pelatih dan personel Komponen Cadangan juga diterima lengkap. Selama pelaksanaan pelatihan dasar kemiliteran, peserta diorganisir dalam bentuk kelas, Peleton, Kompi dan Batalyon serta diberikan jabatan sesuai dengan organisasi dalam pelatihan.

Menurut Risan dan Cecep Surahman, sebagai komponen cadangan menyampaikan bahwa tahap seleksi dilaksanakan selama 11 (sebelas) hari dilanjutkan tahap pelatihan selama 3 (tiga) bulan di Dodik Bela Negara Cikole Lembang. Mereka dilengkapi dengan perlengkapan perorangan dan sarana prasarana. Para personel Komponen Cadangan diorganisir dalam hubungan Kelas, Peleton, Kompi dan Batalyon serta dijabatkan sesuai organisasi dalam pelatihan, diantaranya ada anggota Komponen Cadangan yang menjabat Sekretaris Kompi dan selama pelaksanaan pelatihan dasar kemiliteran (Suhirwan, Lukman Yudho Prakkoso, 2019). Selanjutnya materi yang

diterima berupa pengetahuan tentang lingkup tugas TNI.

Pembahasan dalam tahapan pembentukan Komponen Cadangan di wilayah Kodam III/Siliwangi pada tahun 2021 disetiap kegiatannya, sudah dilaksanakan dengan baik dan sudah sesuai dalam pada Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2021, Bagian Kedua Pembentukan pada pasal 49 ayat (2).

Dihadapkan pada landasan teori strategi merupakan hal yang menggunakan dan mengembangkan semua potensi yang ada di wilayah agar dapat selalu berinteraksi, memenangkan dan mengurangi kemungkinan kekalahan pada suatu peperangan yang didasarkan pada analisa kemampuan sendiri serta lawan yang tidak terbatas oleh waktu. Hal ini selaras dengan penelitian pemberdayaan Komponen Cadangan untuk mendukung strategi pertahanan darat (Ali Ichsanul Mutaqin, 2021). Jika dihadapkan dengan teori kendala menurut Hansen dan Mowen berdasarkan asalnya, yaitu kendala internal bahwa kendala yang ada harus dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan *throughput* semaksimal mungkin tanpa meningkatkan persediaan dan biaya operasional. Yang pada akhirnya adalah memanfaatkan potensi sumber daya manusia atau warga negara dan mengidentifikasi kendala yang ada di dalamnya serta meningkatkan *throughput* tanpa meningkatkan persediaan dan biaya operasional juga memanfaatkan kendala yang terdapat secara maksimal yang diyakini memiliki potensi positif terhadap keberhasilan dalam membentuk Komponen Cadangan untuk pertahanan negara. Terkait dengan teori bela negara menurut (Purnomo Yusgiantoro, 2010) untuk menumbuhkan sikap bela negara dapat dilakukan melalui Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) atau melalui suatu bentuk pelatihan yang berkala dan secara terus menerus. Selaras dengan penelitian, pada pembentukan Komponen Cadangan didalamnya juga bertujuan menumbuhkan sikap bela negara dimana nantinya akan

dilaksanakan pelatihan penyegaran yang berkala, bertahap dan berlanjut seperti yang diatur di dalam perundangan yang berlaku.

Dihadapkan pada penelitian terdahulu yaitu “Komponen Cadangan dalam Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta di abad 21”, oleh (Joni Widjayanto et al, 2021). Terdapat kesamaan pemahaman bahwa pembentukan Komponen Cadangan wajib dilaksanakan sebagai bagian dari kekuatan pertahanan Indonesia terutama dalam menghadapi ancaman nir-militer, dimana kekuatan utama yang superior dalam hal ini Komponen Utama dapat diintegrasikan dengan Komponen Cadangan yang setara kemampuannya pada lingkup tugasnya masing-masing (Lukman Yudho Prakoso, 2017). Hal tersebut sangat dibutuhkan agar dapat menjawab tantangan lingkungan strategis di era globalisasi saat ini karena ancaman saat ini lebih kompleks dimana ancaman menyerang seluruh sendi-sendi kehidupan (Lukman Yudho Prakoso, 2016).

Dihadapkan pada penelitian terdahulu yaitu, “Analisis pembentukan Komponen Cadangan Sebagai Upaya Optimalisasi Peran Angkatan Darat Terhadap Pertahanan Negara (Studi Kasus: Konsep Pembentukan Komponen Cadangan pada Matra Darat) oleh Fredi Firmansyah, Eri Radityawara Hidayat dan Adnan Madjid. Terdapat kesamaan pemahaman dengan peneliti bahwa dengan kurangnya personel TNI AD, disisi lain melimpahnya Sumber Daya Manusia di Indonesia dan kebutuhan yang sangat mendesak untuk diadakannya penguatan unsur pertahanan dalam rangka menghadapi segala bentuk tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan terhadap kedaulatan dan keutuhan NKRI. Sehingga terdapat peluang penguatan unsur pertahanan tersebut dengan membentuk Komponen Cadangan matra darat.

Dihadapkan pada penelitian terdahulu yaitu, “Kesiapan Kapasitas Pengelolaan Komponen Cadangan Matra Darat Guna Memperkuat Komponen Utama TNI” oleh

Devyie Laudya Roringkon, Aris Sarjito, Herlina J.R Saragih. Terdapat kesamaan pemahaman dengan peneliti bahwa dalam strategi, kesiapan kapasitas secara maksimal pada sumber daya manusia yaitu Komponen Cadangan yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan pemilihan yang selektif agar menjaga kualitas dari segi fisik, mental, kesehatan anggota dan juga penambahan, perbaikan, dan koordinasi sarana, fasilitas, instrumen pembinaan, bantuan untuk mewujudkan upaya pertahanan dan ketahanan wilayah melalui Komponen Cadangan yang pada akhirnya akan mendukung tugas Komponen Utama.

Dihadapkan pada penelitian terdahulu yaitu, “Urgensi Pendidikan Bela Negara guna Membangun Sikap Nasionalisme pada Generasi Millennial di Indonesia” oleh Hariswati Rachmadani Putri, Azizoel Metiadini, Hayatul Khairul Rahmat dan Arifuddin Uksan. Terdapat kesamaan pemahaman dengan peneliti bahwa dalam pendidikan bela negara sudah sepatutnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah maupun lingkungan pendidikan karena ancaman militer maupun nirmiliter mampu menghilangkan rasa nasionalisme pada generasi millennial. Dengan adanya pembentukan Komponen Cadangan yang tentunya sudah mendapat perhatian penuh dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan RI serta pesertanya dapat dipastikan adalah generasi millennial, sehingga urgensi pendidikan bela negara kepada generasi millennial dapat dicapai walaupun belum maksimal.

Hasil analisis data tentang pembinaan Komponen Cadangan

Menurut keterangan dari Danrindam, Aster Kasdam, Pabandya Wanwil, Dan Dodik serta Kauropsdik Bela Negara bahwa belum ada pembinaan administrasi (pendataan ulang) maupun program atau kegiatan refreshing/penyegaran sebagai pembinaan kemampuan setelah Komponen Cadangan dikembalikan ke daerah asal.

Sedangkan menurut personel Komponen Cadangan bahwa pembinaan administrasi/pendataan ulang sudah dilaksanakan sejak 3 (tiga) bulan pertama dikembalikan ke profesi masing-masing, pendataan ulang ini dilakukan setiap 3 (tiga) bulan oleh Kodim 0618/BS. Beberapa personel Komponen Cadangan pernah dilibatkan dalam latihan Intelter dan pertempuran terintegrasi yang diselenggarakan Kodam III/Siliwangi dan dilaksanakan pada tanggal 29 dan 30 Agustus 2022 dalam hal ini dikoordinir oleh Kodim 0609/Cimahi serta mereka menggunakan seragam lengkap, berdasarkan RGB Latihan Intelijen, Teritorial dan Pertempuran Kodam III/Siliwangi Ta.2022.

Dalam tahapan Pembinaan Komponen Cadangan di wilayah Kodam III/Siliwangi, setelah personel komponen Cadangan mendapatkan pelatihan dasar kemiliteran dan dikembalikan ke masyarakat belum dilaksanakan sepenuhnya karena memang belum adanya program yang diturunkan dari satuan atas. Hal yang sudah dilakukan sesuai dengan Bagian Keempat Pembinaan pasal 82 ayat (2) poin a pembinaan administrasi, kegiatan tersebut adalah pemutakhiran data/identitas pada tanggal 2 Februari 2023. Sedangkan kegiatan yang belum dilaksanakan terkait pembinaan kemampuan dalam hal ini adalah pelatihan penyegaran seperti yang diatur pada pasal 64 ayat (1) dan (2). Pembinaan kemampuan yaitu pelatihan penyegaran merupakan kegiatan yang dapat menjaga kemampuan anggota Komponen cadangan, yang dilaksanakan selama minimal 12 (dua belas) hari dan paling lama 90 (sembilan puluh) dalam setahun secara bertahap serta berkelanjutan. Selanjutnya jangka waktu sebelum dimobilisasi, Komponen Cadangan dapat diberdayakan dalam kegiatan yang terkait dengan bela negara yang nantinya secara tidak langsung dapat memelihara dan meningkatkan rasa nasionalisme atau cinta tanah air, seperti latihan yang dilaksanakan oleh Kodam III/Siliwangi pada tanggal 29 dan 30 Agustus

2022 yang lalu dihampir seluruh wilayah Kodam III/Siliwangi atau dilibatkan dalam kegiatan penanggulangan bencana di lingkungan domisili personel Komponen Cadangan sebagai relawan (Lukman Yudho Prakoso, 2021).

Dihadapkan pada landasan teori pemberdayaan sesuai Ginanjar Kartasasmitha dan Zubaedi bahwa upaya membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi serta membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya dan berupaya untuk mengembangkannya dalam hal ini potensi kekuatan masyarakat maupun bela negara serta kecintaannya terhadap NKRI akan memaksimalkan Komponen Cadangan yang sudah dibentuk. Hal ini serupa dengan Jim Ife yang juga menyatakan bahwa pemberdayaan dilakukan dengan memberikan sumber daya, pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat/warga untuk meningkatkan kemampuan dalam menentukan masa depan serta berpartisipasi pada upaya mempengaruhi kehidupan kelompoknya. Sehingga dengan terbentuknya Komponen Cadangan dan memberdayakannya pada kegiatan yang terkait dengan bela negara, akan semakin memaksimalkan kemampuan dan kecintaan terhadap bangsa dan negara serta dapat menyebarkan 'virus'nya kepada lingkungan sekitar. Dihadapkan pada teori kendala menurut pendapat peneliti bahwa kendala merupakan potensi dalam mencapai peningkatan performance dengan mengidentifikasi kendala yang ada, meningkatkan *throughput* tanpa meningkatkan persediaan dan biaya operasional serta memanfaatkan kendala yang terdapat pada sumber daya secara maksimal yang diyakini memiliki potensi positif terhadap keberhasilan Komponen Cadangan dalam mendukung pertahanan negara (Lukman Yudho Prakoso, 2021).

Dihadapkan pada penelitian terdahulu yang relevan yaitu, "Analisis Pembentukan Komponen Cadangan Sebagai Upaya Optimalisasi Peran Angkatan Darat Terhadap

Pertahanan Negara” (Studi Kasus: Konsep Pembentukan Komponen cadangan pada Matra Darat) oleh Fredi Firmansyah, Eri Radityawara Hidayat, dan M Adnan Madjid. Terdapat kesamaan dengan peneliti bahwa Komponen Cadangan yang sudah terbentuk dan dikembalikan ke masyarakat merupakan Bapul yang nantinya akan berperan sebagai mata dan telinga dalam membantu TNI kelak. Selanjutnya akan dibentuk kedalam suatu satuan tempur setingkat Batalyon dan Brigade yang komposisi personelnya adalah gabungan dari personel militer aktif (TNI AD) dan personel Komponen Cadangan matra darat (Kasih Prihantoro, 2021). Satuan tersebut ditempatkan di daerah-daerah yang tidak memiliki satuan TNI setingkat Kodim sebagai pelapis dan pendukung Komponen Utama (Lukman Yudho Prakoso, 2020). Dengan kata lain, personel Komponen Cadangan yang sudah mendapat penyegaran secara bertahap dan berkelanjutan dapat diberdayakan secara maksimal sesuai profesinya dalam kegiatan yang terkait dengan bela negara, dimana nanti pada waktunya sebagai pendukung Komponen Utama saat dilaksanakan mobilisasi Kunto Wibowo, 2020).

Dihadapkan pada penelitian terdahulu yang relevan yaitu, “Strategi Mencegah Munculnya Ekses Negatif Paska Pembentukan Komponen Cadangan di Indonesia” oleh (Nanto Nurhuda, Joni Widjayanto, dan Lukman Yudho Prakoso, 2021). Terdapat kesamaan pemahaman dengan peneliti bahwa program pembentukan komponen Cadangan oleh Kementerian Pertahanan RI memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya adalah memperkuat pertahanan negara dan dapat dipergunakan (mobilisasi) sewaktu-waktu, sedangkan kerugiannya adalah munculnya gaya militeristik, penyalahgunaan kemampuan, munculnya Ormas/kelompok yang membawa nama komponen cadangan, cost yang tidak sepadan dengan benefit, espektasi yang berlebihan dari internal maupun eksternal, penolakan oleh perorangan maupun

organisasi, digunakan sebagai alat politik baru, loyalis pejabat tertentu, potensi korupsi anggaran, gesekan dengan militer reguler dan lain-lain (Apriyani, LYP, 2017). Tetapi adanya ekses negatif tersebut dapat diminimalisir dengan melakukan pengawasan secara berlanjut, atau mengubah ekses negatif menjadi peluang dalam memaksimalkan kemampuannya menjadi hal yang positif dan akan dimanfaatkan potensinya untuk mendukung Komponen Cadangan (Suhirwan & Lukman Yudho Prakoso, 2018).

Kesimpulan Rekomendasi dan Pembatasan Kesimpulan

Dari hasil pembahasan diatas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Komponen Cadangan dalam hal ini sumber daya manusia yaitu warga negara Indonesia yang telah mendapatkan pelatihan dasar militer, seperti yang termaktub dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dihadapkan dengan strategi pertahanan darat masa depan, yaitu mempersiapkan perang berlarut sesuai sistem pertahanan semesta. Personel Komponen Cadangan perlu diberdayakan sesuai dengan kemampuan yang telah diberikan selama tahap pembentukan. Kegiatan pada tahap pembentukan dilaksanakan oleh seluruh Kotama jajaran TNI dengan pengendalian penuh oleh Kementerian Pertahanan RI, Kotama dalam hal ini Kodam III/Siliwangi dan jajarannya. Kodam III/Siliwangi dan jajarannya sudah melaksanakan pembentukan Komponen Cadangan mulai dari pendaftaran sampai dengan penetapan pada tahun 2021 dengan jumlah 500 orang personel sesuai dengan tahapan dan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Pemberdayaan Komponen Cadangan Komponen Cadangan di wilayah

Kodam III/Siliwangi: Selanjutnya setelah dikembalikan kepada profesi masing-masing, sesuai dengan PP nomor 3 tahun 2021 pada tahap pembinaan baik pembinaan administrasi maupun pembinaan kemampuan dilaksanakan pendataan ulang serta diberikan refreshing atau pelatihan penyegaran terhadap kemampuannya dalam jangka waktu tertentu sesuai yang diatur dalam peraturan perundangan. Personel Komponen Cadangan sebelum dimobilisasi dapat dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bela negara maupun latihan oleh satuan TNI AD di lingkungan tempat tinggal atau tempat bekerjanya. Kemudian pada kondisi nyata, Komponen Cadangan di wilayah Kodam III/Siliwangi sudah dilibatkan dalam beberapa kegiatan latihan yang dilaksanakan oleh Kodam III/Siliwangi dan dalam pemanfaatan keilmuan yang dimiliki oleh personel tersebut. Beberapa pertimbangan yang menjadi dasar untuk tidak melibatkan Komponen Cadangan dalam kegiatan lain atau tugas-tugas OMSP yaitu: adanya regulasi yang menyebutkan bahwa penggunaan Komponen Cadangan setelah pernyataan mobilisasi oleh Presiden (pasal 61 UU nomor 23 tahun 2019) dan tidak adanya anggaran dalam kegiatan melibatkan personel Komponen Cadangan tersebut. Sehingga diharapkan dengan dilakukannya pemberdayaan tersebut maka akan berdampak positif yaitu maksimalnya kesiapan Komponen Cadangan untuk nantinya dimobilisasi dalam rangka mendukung strategi Pertahanan darat di wilayah Kodam III/Siliwangi.

Saran

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, peneliti menyampaikan beberapa saran untuk

memberdayakan Komponen Cadangan dalam hal ini sumber daya manusia agar nantinya siap untuk dimobilisasi dalam rangka memperkuat dan memperbesar kekuatan Komponen Utama di wilayah Kodam III/Siliwangi. Saran-saran tersebut yaitu:

1. agar kemampuan Komponen Cadangan dapat dipelihara dan ditingkatkan, disarankan TNI dalam hal ini jajaran Kodam III/Siliwangi dapat memberdayakan Komponen Cadangan pada kegiatan yang terkait dengan bela negara atau melibatkannya pada tugas-tugas yang terkait dengan perbantuan TNI kepada Pemerintah Daerah dan instansi lain seperti latihan militer, penanggulangan bencana alam atau sosialisasi tentang bela negara, yang dilakukan dalam jangka waktu sebelum dilaksanakan mobilisasi.
2. agar personel Komponen Cadangan dapat dilibatkan pada kegiatan atau tugas-tugas TNI dalam hal ini oleh Kodam III/Siliwangi dan jajarannya, misalnya kegiatan latihan atau penanggulangan bencana maupun kegiatan-kegiatan lain terkait bela negara, disarankan agar merevisi regulasi yang ada sehingga tidak ditemukan lagi keragu-raguan dalam mengikutsertakan personel Komponen Cadangan di wilayah Kodam III/Siliwangi pada kegiatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ali, Ichsanul Mutaqin; Prakoso, Lukman Yudho; Sianturi, Dohar. (2021). Strategi Pertahanan Laut dalam Menghadapi Ancaman Keamanan maritim di Wilayah Laut Indonesia.
- [2] Apriyani, Lukman Yudho Prakoso. 2017. Analisis Kemampuan Industri Galangan Kapal Swasta dalam Mendukung Kebutuhan Alutsista TNI AL. Strategi Pertahanan Laut.

- [3] Creswell, J. W. (2019). *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publication.
- [4] Harris, Amora; Prakoso, Lukman Yudho; Sianturi, Dohar. (2021). *Strategi Pertahanan Laut dalam Rangka Ancaman Keamanan di Alur Laut Kepulauan Indonesia II*.
- [5] Jaya, Agus Damar; Prakoso, Lukman Yudho; Suhirwan. (2022). *Pertahanan Dan Keamanan Di Selat Singapura Terhadap Peningkatan Pembajakan, Konsistensi Kebijakan Publik, Dan Konsesi Wilayah Negara Litoral*. *Jurnal: Strategi Pertahanan Laut*.
- [6] Joni Widjayanto, Deni Dadang, Priyanto, Lukman Yudho Prakoso, Helda Risman, Muhammad Ikmal Setiadi. (2021). *Komponen Cadangan Dalam Sistem Pertahanan Kemanan Rakyat Semesta Di Abad 21*.
- [7] Kartika Eka Paksi. (2020). *Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1024/XII/2020 Doktrin TNI AD. tanggal 21 Desember 2020*.
- [8] Kasih Prihantoro, Lukman Yudho Prakoso, Suhirwan. (2021). *Urgensi Transformasi Networking dan Driver Force Kebijakan Pertahanan*. ISBN: 9786239602611.
- [9] Kunto Wibowo, Lukman Yudho Prakoso. (2020). *Ketika mangsa menaklukan predator Penjejak Laut Strategis*.
- [10] Kurniawan, Cecep; Widyarto, Setyawan; Prakoso, Lukman Yudho. (2020). *Implementasi Struktur Birokrasi Strategi Pertahanan Laut Menghadapi Ancaman di Perairan Provinsi Sulawesi Tenggara*. *Jurnal: Strategi Pertahanan Laut*
- [11] Lukman Yudho Prakoso, odi Marefanda. (2017). *Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan Dan Perikanan (Studi Kasus Usaha Garam Rakyat)*.
- [12] Lukman Yudho Prakoso, Apriyani. (2017). *Analisis Kemampuan Industri Galangan Kapal Swasta dalam Mendukung Kebutuhan Alutsista TNI AL, Strategi Pertahanan Laut*.
- [13] Lukman Yudho Prakoso. (2021). *strategi pertahanan laut menghadapi ancaman di perairan Provinsi Sulawesi Tenggara*. *Proceedings KKDN Universitas Pertahanan*. ISBN : 9786236610237
- [14] Lukman Yudho Prakoso, Suhirwan, Kasih Prihantoro, Sumantri, Asep Iwa, Rianto. (2021). *Kebijakan Pertahanan Laut*. Pustaka Media Guru.
- [15] Lukman Yudho Prakoso, Suhirwan, Kasih Prihantoro. (2020). *Sea Defense Strategy And Urgency Of Forming Maritime Command Center*. *Jurnal Pertahanan: Media Informasi Ttg Kajian & Strategi Pertahanan Yang Mengedepankan Identity, Nasionalism & Integrity*.
- [16] Lukman Yudho Prakoso, Suhirwan, Kasih Prihantoro. (2020). *Urgency Of Forming Maritime Command Center*.
- [17] Lukman Yudho Prakoso; Suhirwan; Sianturi, Dohar; Adriyanto, Agus; Damayanti, Ratna. (2019). *Implementasi kebijakan Pokok-Pokok Penyelenggaraan Tugas Bantuan Tentara Nasional Indonesia dalam Menanggulangi Bencana Alam*. *Proceeding ICDM Volume 2*. Indonesia Defence University.
- [18] Lukman Yudho Prakoso. (2018). *Strategi Maritim Penanganan Kejahatan Lintas Negara Di Perbatasan Laut Indonesia Dikabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara*. *Sekolah Staf Dan Komando TNI AL*.
- [19] Lukman Yudho Prakoso. (2016). *Teori Implementasi Kebijakan Publik*.
- [20] Nanto Nurhuda, Joni Widjayanto, Lukman Yudho Prakoso. (2021). *Strategi Mencegah Munculnya Ekses Negatif Paska Pembentukan Komponen*

- Cadangan Di Indonesia. Vol.1 No.11 April 2021. Jurnal JIP.
- [21] Purnomo Yusgiantoro. (2010). Pencapaian Pembangunan Pertahanan dan Keamanan setelah 65 Tahun Indonesia Merdeka. Jurnal Sekretariat Negara Republik Indonesia “Negarwan” Nomor 17. Edisi Agustus 2010.
- [22] Suhirwan; Prakoso, Lukman Yudho. (2019). Forum Maritim Kunci Sukses Penanggulangan Ancaman Asimetris di Selat Sunda. Seminar dan Lokakarya Kualitatif Indonesia.
- [23] Suhirwan, Lukman Yuho Prakoso. (2018). Strategi Pertahanan Dalam Penanganan Kejahatan Lintas Negara Di Perbatasan Laut Manado Sulawesi Utara. Membangun Indonesia: Resolusi Konflik Sosial Lintas Prespektif. Indonesia Qualitative Reseacher Association (IQRA).